

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Responden dari penelitian ini berasal dari 1 Kota 4 Kabupaten yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta, meliputi Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Yogya. Responden beragam baik laki-laki atau perempuan, sampai dengan jenis pekerjaan yang secara acak ditemui di lapangan. Kriteria responden yang diperlukan adalah masyarakat yang memiliki NPWP.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara menyebar kuesioner. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 150. Masing-masing wilayah disebar kuesioner sebanyak 30. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 26 Februari 2017. Berdasarkan kuesioner yang terkumpul terdapat presentase sebagai berikut.

Tabel 4.1
Presentase Berdasarkan Lokasi Pengumpulan

No.	Wilayah	Disebar	Digunakan	Presentase
1	Bantul	30	26	21%
2	Gunung Kidul	30	18	14%
3	Kulon Progo	30	21	17%
4	Sleman	30	30	24%
5	Yogya	30	30	24%
Jumlah		150	125	
Presentase		100%	83%	100%

Untuk Wilayah Yogya dan Sleman Kuesioner yang digunakan sebanyak 30. Wilayah Bantul, kuesioner yang digunakan sebanyak 26 karena

terdapat kecacatan pengisian sebanyak 4 kuesioner. Sedangkan wilayah Kulon Progo, kuesioner yang digunakan sebanyak 21 karena terdapat kecacatan pengisian sebanyak 2 kuesioner dan sebanyak 7 kuesioner tidak kembali. Dan untuk wilayah Gunung Kidul, kuesioner yang digunakan sebanyak 18 karena terdapat kecacatan pengisian sebanyak 1 kuesioner dan 11 kuesioner tidak kembali karena kemauan mengisi responden yang rendah. Maka kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 125.

Tabel 4.2
Presentase Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	76	61%
2	Perempuan	49	39%
Jumlah		125	100%

Tabel 4.3
Presentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Usaha	68	54%
2	Pekerjaan Bebas	34	27%
3	PNS	23	18%
Jumlah		125	100%

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Akuntansi			Kisaran Teoritis		
	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
SD (2 butir pertanyaan, Skala <i>Likert</i>)	1	5	3,69	2	10	7,38
KP (4 butir pertanyaan, Skala <i>Likert</i>)	1	5	3,07	2	10	12,28
TK (3 butir pertanyaan, Skala <i>Likert</i>)	1	5	3,40	2	10	10,21
PP (3 butir pertanyaan, Skala <i>Likert</i>)	1	5	2,85	2	10	8,57

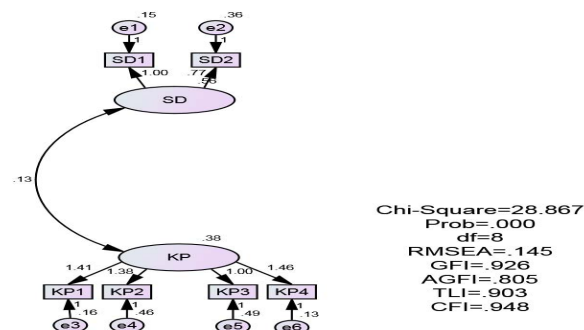
Masing-masing variabel mempunyai nilai minimum sebesar 1 dan nilai maximum sebesar 10. Yang membedakan adalah nilai mean atau rata-rata setiap variabel. Variabel SD mempunyai nilai *Mean* sebesar 3,69. KP sebesar 3,07. TP sebesar 3,40, dan PP mempunyai nilai *Mean* sebesar 2,85.

B. Uji Kualitas Instrumen Data

Dalam proses analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) yang menggunakan *software* AMOS 21.0, sebelum melakukan uji model, harus dilakukan *Confirmatory Factors Analysis* (CFA) terlebih dahulu.

1. Uji Konfirmatori Faktorial Konstruksi Eksogen

Bertujuan untuk menguji hubungan antara konstruksi eksogen dengan variabel latennya yang dibentuk berdasarkan konsep teoritis dengan indikator-indikatornya. Sehingga dapat diketahui valid tidaknya indikator yang digunakan terhadap variabel latennya. Variabel konstruksi eksogen terdiri dari variabel sanksi dan keadilan prosedural dengan masing-masing memiliki 2 dan 4 indikator variabel laten.



Gambar 4.1
Uji CFA Konstruksi Eksogen

Tabel 4.5
Hasil *Goodness of Fit Index* Antar Konstruk Eksogen

<i>Goodness of fit Index</i>	Cutt-of value	Model Penelitian	Keterangan
<i>Chi-Square</i>	$\leq 15,507$ (<i>Chi-Square</i> untuk df 8; taraf Sig 5% = 15,507)	28,867	<i>Poor Fit</i>
Probabilitas	$\geq 0,05$	0,000	<i>Poor Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,145	<i>Poor Fit</i>
GFI	$\geq 0,80$	0,926	<i>Good Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,805	<i>Marginal Fit</i>
TLI	$\geq 0,90$	0,903	<i>Good Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,948	<i>Good Fit</i>

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Berdasarkan hasil uji konfirmatori konstruk eksogen yang terdiri dari sanksi dan keadilan prosedural, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelayakan pada model penelitian. Dari indeks-indeks kesesuaian model dapat diketahui nilai GFI, AGFI, TLI, dan CFI memberikan konfirmasi yang cukup baik kaitannya dengan dapat diterimanya suatu hipotesis. Meskipun terdapat indeks *Chi-Square*, probabilitas dan RMSEA yang menunjukkan angka dibawah *cut-off value*, namun variabel yang diteliti dapat menjelaskan/mencerminkan variabel laten yang dianalisis.

Menurut Hair (1998), model dapat terpenuhi kelayakannya apabila paling tidak terdapat salah satu metode uji kelayakan berhasil memenuhi kriteria yang ada. Sehingga model ini dapat diterima dan dapat disimpulkan terdapat konstruk yang berbeda dengan dimensi-dimensinya.

Tabel 4.6
Output Regression Weight Konstruk Eksogen
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
SD1	<---	SD	1.000				
SD2	<---	SD	.775	.312	2.483	.013	par_1
KP3	<---	KP	1.000				
KP2	<---	KP	1.376	.190	7.238	***	par_2
KP1	<---	KP	1.411	.161	8.763	***	par_3
KP4	<---	KP	1.459	.182	8.022	***	par_4

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Untuk mengetahui kuat tidaknya dimensi yang digunakan untuk membentuk faktor latennya, maka dapat dianalisis dengan uji signifikansi terhadap *regression weight* yang ditentukan dengan syarat setiap indikator harus memiliki nilai C.R > 2,00 dan nilai sig. <0,05. Apabila bobot faktor sudah sesuai dengan syarat, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konstruk yang dipakai dapat menjelaskan variabel latennya.

Tabel 4.7
Output Loading Factor Konstruk Eksogen
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate
SD1	<---	SD	.886
SD2	<---	SD	.697
KP3	<---	KP	.662
KP2	<---	KP	.784
KP1	<---	KP	.908
KP4	<---	KP	.929

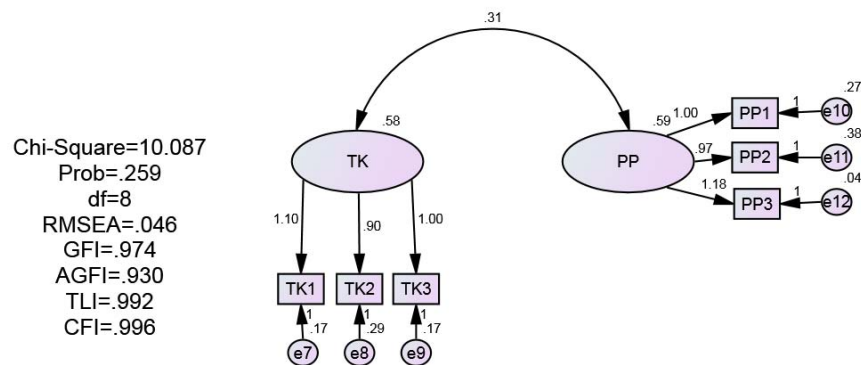
Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Untuk mengetahui apakah indikator dapat menjelaskan factor latennya, dapat juga dengan melihat nilai *loading factor*. Syarat yang ditetapkan nilai *loading factor* > 0,50. Hasil uji konfirmatori menunjukkan

bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* $> 0,50$. Sehingga tidak ada indikator yang harus dibuang.

2. Uji Konfirmatori Konstruk Endogen

Uji konfirmatori konstruk endogen bertujuan sama dengan uji konfirmatori konstruk endogen yaitu untuk mengetahui validitas dari indikator-indikator yang membentuk variabel laten yang secara langsung dihubungkan dengan konstruk endogen lainnya. Variabel laten dalam penelitian ini dibentuk dengan didasari konsep teoritis. Konstruk endogen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat kepercayaan dengan menggunakan 3 indikator dan kepatuhan pajak juga dengan menggunakan 3 indikator pengukur.



Gambar 4.2
Uji CFA Konstruk Endogen

Tabel 4.8
Hasil *Goodness of Fit Index* Antar Konstruk Endogen

<i>Goodness of fit Index</i>	<i>Cutt-of value</i>	Model Penelitian	Keterangan
<i>Chi-Square</i>	$\leq 15,507$ (<i>Chi-Square</i> untuk df 8; taraf Sig 5% = 15,507)	10,087	<i>Good Fit</i>
Probabilitas	$\geq 0,05$	0,259	<i>Good Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,046	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,80$	0,974	<i>Good Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,930	<i>Good Fit</i>
TLI	$\geq 0,90$	0,992	<i>Good Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,996	<i>Good Fit</i>

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Hasil dari uji konfirmatori konstruk endogen pada tabel dapat menjelaskan bahwa model mempunyai kelayakan yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kriteria dari indeks *Goodness of Fit*. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut dapat menjelaskan variabel latennya.

Tabel 4.9
Output *Regression Weight* Konstruk Endogen
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
TK3 <--- TK	1.000				
TK1 <--- TK	1.095	.087	12.628	***	par_1
PP1 <--- PP	1.000				
PP2 <--- PP	.966	.096	10.111	***	par_2
PP3 <--- PP	1.179	.093	12.622	***	par_3
TK2 <--- TK	.900	.085	10.585	***	par_4

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Dapat dilihat pada Tabel 4.8 bahwa seluruh konstruk endogen dapat menunjukkan nilai signifikansinya. Terpenuhinya kriteria ditentukan dari

hasil $\text{sig.} < 0,05$ dan nilai $\text{C.R.} > 2,00$. Sehingga variabel konstruk yang digunakan dapat menjelaskan variabel latennya masing-masing.

Tabel 4.10
Output Loading Factor Konstruk Endogen
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

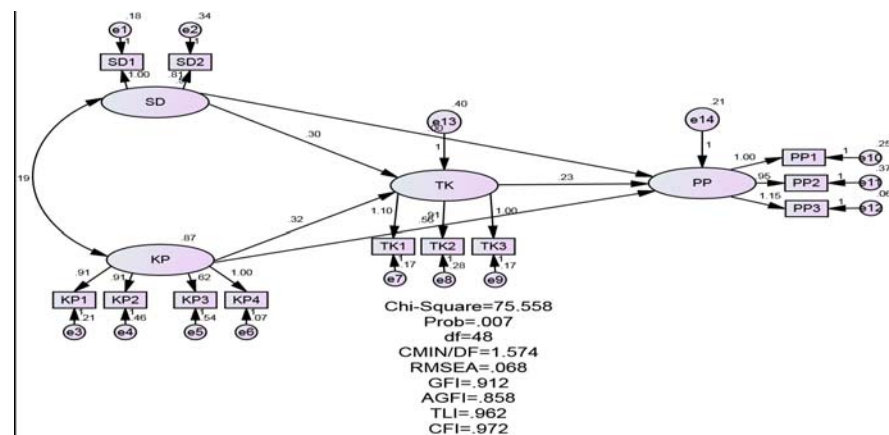
		Estimate
TK3	<--- TK	.879
TK1	<--- TK	.894
PP1	<--- PP	.827
PP2	<--- PP	.771
PP3	<--- PP	.974
TK2	<--- TK	.787

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Nilai yang disyaratkan agar kriteria *loading factor* dipenuhi adalah nilai $> 0,50$. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh indikator pembentuk variabel laten memiliki nilai diatas 0,50, sehingga tidak ada indikator yang harus dihilangkan

3. Pengujian Model Struktural

a. Uji Model Struktural



Gambar 4.3
Uji Model Struktural

Tabel 4.11
Hasil Goodness of Fit Index Model Struktural

<i>Goodness of fit Index</i>	<i>Cutt-of value</i>	Model Penelitian	Keterangan
<i>Chi-Square</i>	$\leq 65,170$ (<i>Chi-Square</i> untuk df 48; taraf Sig 5% = 65,170)	75,558	<i>Marginal Fit</i>
Probabilitas	$\geq 0,05$	0,007	<i>Marginal Fit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0,068	<i>Good Fit</i>
GFI	$\geq 0,80$	0,912	<i>Good Fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0,858	<i>Marginal Fit</i>
TLI	$\geq 0,90$	0,962	<i>Good Fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	0,972	<i>Good Fit</i>

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Hasil *Goodness of Fit Index* menunjukkan model struktural sudah cukup fit dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik.

Tabel 4.12
Output Standardized Regression Weight Model Struktural
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
SD1	<--- SD	.867
SD2	<--- SD	.712
KP3	<--- KP	.617
KP2	<--- KP	.784
TK3	<--- TK	.877
TK2	<--- TK	.790
TK1	<--- TK	.894
PP1	<--- PP	.841
PP2	<--- PP	.772
PP3	<--- PP	.962
KP4	<--- KP	.961
KP1	<--- KP	.882

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Berdasarkan hasil Tabel 4.12 dapat dilihat indikator-indikator tidak ada yang mempunyai nilai dibawah 0,50. Sehingga dapat disimpulkan indikator-indikator tersebut sudah signifikan secara statistik.

4. Pengujian Evaluasi Asumsi Model Struktural

a. Uji Normalitas Data

Untuk lolos uji normalitas maka harus memenuhi nilai batas c.r atau *critical ratio skewness value* $\pm 2,58$ pada tingkat signifikansi 0,01. Data akan dinyatakan sudah berdistribusi normal apabila nilai *critical ratio skewness value* sebesar $\pm 2,58$ (Ghazali, 2014).

Tabel 4.13
Output Assessment of Normality
Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PP3	1.000	5.000	.098	.447	-.367	-.838
PP2	1.000	5.000	.182	.833	-.342	-.780
PP1	1.000	5.000	.119	.543	-.026	-.060
TK1	1.000	5.000	.001	.004	-.636	-1.452
TK2	1.000	5.000	.029	.131	-.454	-1.036
TK3	1.000	5.000	-.248	-1.134	-.319	-.728
KP1	1.000	5.000	-.279	-1.274	-.325	-.743
KP2	1.000	5.000	-.250	-1.141	-.552	-1.260
KP3	1.000	5.000	-.192	-.876	.029	.067
KP4	1.000	5.000	-.168	-.768	-.307	-.701
SD2	1.000	5.000	-.356	-1.627	.034	.077
SD1	1.000	5.000	-.049	-.225	-.253	-.578
Multivariate					3.213	.980

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Dari output diatas dapat dilihat bahwa nilai *critical ratio skewness* adalah sebesar $\pm 2,58$.. Dari hasil tersebut didapat pula nilai

critical ratio multivariate sebesar 0,980 dimana masih dalam rentang \pm 2,58, yang artinya semua data atau indikator berdistribusi normal.

b. Evaluasi Outlier

Outlier dijelaskan sebagai kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik tertentu dimana data tersebut terlihat jauh berbeda dengan observasi yang lain. Kondisi ini dapat muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim pada semua variabel tunggal ataupun kombinasi (Hair, 1998). Dengan menggunakan *software* AMOS 21.0, guna mendeteksi multivariat outlier dapat dilihat dalam hasil mahalanobis.

Kriteria yang disyaratkan didasarkan pada nilai *Chi-Square* pada *degree of freedom* sebesar 48 dengan tingkat signifikansi $p = 0,005$. Nilai dari mahalanobis $\chi^2 (48;0,005) = 65,170$ dimana nilai tersebut dijadikan sebagai batas mahalanobis.

Tabel 4.14
Output Mahalanobis Model Struktural
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
2	26.765	.008	.649
1	24.884	.015	.575
34	24.838	.016	.310
89	23.537	.024	.339
119	22.342	.034	.417
32	21.792	.040	.382

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa tidak ada nilai mahalanobis yang lebih 65,170 sehingga dapat disimpulkan data secara *multivariate* lolos uji *outlier*.

Tabel 4.15
Hasil Uji *Outlier Univariate*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zscore(SD1)	125	-2,07803	1,62844	,0000000	1,0000000
Zscore(SD2)	125	-2,29883	1,48208	,0000000	1,0000000
Zscore(KP1)	125	-2,10206	2,03585	,0000000	1,0000000
Zscore(KP2)	125	-1,86077	1,80216	,0000000	1,0000000
Zscore(KP3)	125	-2,43331	1,82073	,0000000	1,0000000
Zscore(KP4)	125	-1,97347	2,12086	,0000000	1,0000000
Zscore(TK1)	125	-2,57792	1,70434	,0000000	1,0000000
Zscore(TK2)	125	-2,63996	1,94330	,0000000	1,0000000
Zscore(TK3)	125	-2,87830	1,73436	,0000000	1,0000000
Zscore(PP1)	125	-2,02195	2,28008	,0000000	1,0000000
Zscore(PP2)	125	-1,92385	2,22238	,0000000	1,0000000
Zscore(PP3)	125	-1,96783	2,32875	,0000000	1,0000000
Valid N (listwise)	125				

Sumber : Hasil Uji Z score SPSS 21.0

Pengujian ini berguna untuk mendeteksi *univariate outliers* dengan menggunakan program IBM SPSS 21.0. Kriteria yang harus dipenuhi adalah nilai harus berada diantara $Z \text{ Score} \leq 3$ atau $Z \text{ Score} \geq 3$. Hasil dari table diatas berkisar antara -2,87830 sampai 2,32875. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi *univariate outliers* dalam model penelitian.

c. Multikolinearitas

Tabel 4.16
Output Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,491	,964		,509	,611		
SD	,030	,115	,018	,261	,794	,876	1,142
KP	,403	,053	,542	7,583	,000	,805	1,242
TK	,285	,078	,270	3,648	,000	,754	1,327

a. Dependent Variable: PP

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 21.0

Untuk mengetahui terjadi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang disyaratkan sebesar $> 0,01$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar < 10 . Dari hasil penelitian didapatkan nilai *tolerance* masing-masing variabel masih berada dibawah 10. Sedangkan nilai VIF sudah memenuhi syarat yaitu lebih besar dari 0,01. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

a. Uji Reliabilitas

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi	0,764	Reliabel
Keadilan Prosedural	0,886	Reliabel
Kepercayaan kepada Otoritas	0,887	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0,888	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 21.0

Reliabilitas dapat diartikan sebagai ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator pembentuk variabel yang akan menunjukkan derajat sama dimana masing-masing indikator membentuk sebuah variabel secara umum (Ghazali, 2004).

Untuk mengetahui indikator yang digunakan sudah reliabel atau belum dapat dilihat pada nilai *cronbach alpha* > 0,6 (Nazaruddin dan Fajry, 2016). Hasil Tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa hasilnya reliabel.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan cara melihat hasil dari nilai *critical ratio* dari hasil *Regression Weight*. Apabila nilai dari *critical ratio* > 2,00 dengan tingkat sig. $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Tabel 4.18
Hasil *Regression Weight* Model Struktural
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
TK	<---	SD	.299	.115	2.607	.009	par_8
TK	<---	KP	.319	.074	4.306	***	par_9
PP	<---	KP	.562	.070	8.012	***	par_12
PP	<---	TK	.232	.083	2.778	.005	par_13
PP	<---	SD	.004	.080	.054	.957	par_14

Nilai Sig. < $\alpha = 5\%$

Sumber : Data Primer yang diolah dengan AMOS 21.0

1. Pengujian Hipotesis 1a : Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil *Regression Weight* dapat dilihat nilai estimasi sudah sesuai kriteria > 0 yaitu sebesar 0,004. Sedangkan nilai c.r belum memenuhi kriteria dimana hasilnya sebesar 0,054 yang masih tidak lebih besar dari 2,00. Tingkat signifikan yang ditunjukkan dengan nilai p juga tidak memenuhi kriteria yakni sebesar 0,957 yang seharusnya nilainya $< 0,050$. Sehingga dapat diartikan sanksi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dari hasil tersebut, maka Hipotesis 1a ditolak, yang menunjukkan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengujian Hipotesis 1b : Sanksi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan

Hasil *Regression Weight* menunjukkan nilai c.r $2,607 > 2,00$. Nilai p $0,009 < 0,050$ dan nilai estimasi sebesar $0,299 > 0$. Semua kriteria yang dibutuhkan untuk penerimaan hipotesis sudah terpenuhi. Sehingga dapat diartikan sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan.

Dari hasil tersebut, maka Hipotesis 1b diterima, yang menunjukkan sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan.

3. Pengujian Hipotesis 2a : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Dari Tabel 4.18 dapat dilihat nilai c.r sebesar 8.012 yang artinya sudah memenuhi kriteria. Nilai dari estimasi dan tingkat signifikan dengan

masing-masing bernilai 0,562 dan 0,000 yang juga telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sehingga dapat diartikan keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari hasil tersebut, maka Hipotesis 2a diterima, yang menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4. Pengujian Hipotesis 2b : Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.18, *Regression Weight* menghasilkan nilai estimasi sebesar $0,319 > 0$, nilai p sebesar $0,000 < 0,050$, dan nilai $c.r$ sebesar $4,306 > 2,00$. Semua kriteria mampu dipenuhi untuk penerimaan hipotesis. Sehingga dapat diartikan keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan.

Dari hasil tersebut, maka Hipotesis 2b diterima, yang menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan.

5. Pengujian Hipotesis 3 : Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil *Regrssion Weight* menunjukkan seluruh kriteria sudah terpenuhi. Masing masing nilai nya antara lain, nilai estimasi $0,232 > 0$, nilai $c.r$ sebesar $2,778 > 2,00$, dan nilai p $0,005 < 0,050$. Sehingga dapat diartikan tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari hasil tersebut, maka Hipotesis 3 diterima, yang menunjukkan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4.19
Output Standardized Direct dan Indirect Index

Hubungan Langsung	Hubungan Tidak Langsung	Hubungan Langsung	Hubungan Tidak Langsung
SD → PP	SD → TK → PP	KP → PP	KP → TK → PP
0,004	0,065	0,562	0,089
0,004 < 0,065		0,562 > 0,089	

Sumber : Data Promer yang diolah dengan AMOS 21.0

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Suatu variabel dapat diterima sebagai variabel pemediasi (intervening) apabila nilai hubungan tidak langsung > nilai hubungan langsung.

6. Pengujian Hipotesis 1c : Sanksi yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan hasil nilai hubungan langsung antara sanksi terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,004. Sedangkan hubungan tidak langsung sanksi denda terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat kepercayaan sebagai pemediasi adalah sebesar 0,065. Sehingga $0,004 < 0,065$ yang dapat diartikan bahwa tingkat kepercayaan dapat diterima sebagai variabel pemediasi antara sanksi terhadap kepatuhan pajak. Atas dasar hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan H1c diterima.

7. Pengujian Hipotesis 2c : Keadilan Prosedural yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari tabel 4.19 didapatkan hasil nilai hubungan langsung antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,562.

Sedangkan hubungan tidak langsung keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat kepercayaan sebagai pemediasi adalah sebesar 0,089. Sehingga $0,562 > 0,089$ yang dapat diartikan bahwa tingkat kepercayaan tidak dapat diterima sebagai variabel pemediasi antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Atas dasar hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan H2c ditolak.

D. Pembahasan (Interpretasi)

1. Pembahasan H1a : Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis, didapatkan hasil H1a ditolak yang menunjukkan bahwa sanksi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sanksi maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Hasil tersebut sesuai dengan teori *The Slippery Slope* yang menjelaskan dimana pada saat otoritas semakin menguatkan kekuasaannya dengan sanksi, maka wajib pajak justru enggan untuk lebih patuh.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, terdapat penelitian terahulu yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014), Samudra (2015), Zulaikha (2013) juga menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari sanksi terhadap kepatuhan pajak.

Hasil dari statistik deskriptif dari sanksi menunjukan jawaban sebagian besar responden adalah netral. Ini artinya pendapat wajib pajak dari pengenaan sanksi apabila tidak memenuhi kewajibannya adalah

netral. Sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi masih belum dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Menurut Zulaikha (2013), hal seperti demikian dapat terjadi dikarenakan pengetahuan wajib pajak yang masih minim mengenai sanksi perpajakan dan pelaksanaannya. Tujuan pemberian sanksi tentunya untuk mendorong kepatuhan dari wajib pajak. Akan tetapi, pengetahuan yang minim mengenai sanksi dapat membuat wajib pajak beranggapan sanksi bukan hal yang menakutkan. Dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,69. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang ada di 5 kota tersebut masih rendah.

Tidak hanya mengenai pengetahuan sanksi perpajakan yang minim, tidak berpengaruhnya sanksi terhadap kepatuhan dapat disebabkan oleh bagaimana pelaksanaan sanksi tersebut sudah dilaksanakan. Apabila pihak otoritas tidak tegas dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar pajak, maka wajib pajak juga akan menganggap bahwa sanksi tersebut bukan suatu hal yang perlu untuk dikhawatirkan, sehingga tidak akan mempengaruhi patuh tidaknya seseorang.

Kesadaran adalah salah satu unsur dimana seseorang memahami realitas dan bagaimana dia akan bertindak/menyikapi realitas tersebut. Kesadaran ditentukan oleh beberapa hal yaitu kesadaran bahwa membayar pajak sebagai partisipasi pembangunan Negara, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara, dan kesadaran bahwa membayar pajak dapat dipaksakan sesuai undang

undang. Alasan lain tidak berpengaruhnya sanksi terhadap kepatuhan adalah rendahnya kemauan membayar pajak. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pembangunan Negara, beban Negara, dan sanksi yang ada, akan tetapi apabila melihat realitas yang terjadi bahwa uang pajak disalahgunakan, maka wajib pajak cenderung untuk tidak mau untuk lebih patuh. Juga masih terdapat banyak wajib pajak yang ingin melindungi hartanya untuk dirinya sendiri.

2. Pembahasan H1b : Pengaruh Sanksi terhadap Tingkat Kepercayaan.

Melalui pengujian hipotesis, didapatkan hasil bahwa H1b diterima. Artinya sanksi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan terhadap otoritas. Semakin tinggi sanksi maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas.

Hal ini mengacu pada bagaimana otoritas telah melaksanakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat otoritas memberikan sanksi terhadap para pelanggar pajak sesuai peraturan perpajakan maka akan timbul rasa percaya bahwa otoritas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak hanya itu, pada saat sanksi dilaksanakan secara tegas, maka hak untuk mendapatkan keadilan bagi wajib pajak juga terpenuhi. Seperti contohnya apabila pelanggar pajak mencuri uang pajak, yang dirugikan adalah Negara, sedangkan salah satu sumber dana terbesar untuk pembangunan Negara adalah pajak. Kepercayaan diasumsikan akan dipengaruhi oleh variabel psikologis seperti pengetahuan, sikap, norma, sosial, dan keadilan (Kohgler, 2013)

Sehingga pada saat para pelanggar pajak mendapatkan hukuman secara adil wajib pajak merasa hak nya terpenuhi. Hal ini akan menimbulkan rasa kepercayaan dan *respect* yang tinggi dari wajib pajak terhadap otoritas pajak.

3. Pembahasan H2a : Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis H2a diterima karena sudah terpenuhinya kriteria untuk penerimaan hipotesis yang terdiri dari nilai estimasi, c.r, dan tingkat signifikansinya. Artinya keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dimana semakin tinggi keadilan prosedural yang dirasakan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Keadilan adalah melakukan perbandingan antara kontribusi dan manfaat yang berguna sebagai pertimbangan bagaimana seseorang akan merasa diperlakukan relatif terhadap orang lain. Keadilan yang dirasakan baik dari distribusi beban pajak maupun prosedur pajak yang ditetapkan oleh otoritas diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menentukan kepatuhan pajak (Kohgler, 2013).

Keadilan prosedural yang dirasakan oleh wajib pajak akan membangun hubungan interaksi yang baik dengan pihak otoritas. Dimana wajib pajak merasa bahwa dia sudah dilibatkan dalam pembuatan keputusan, mendapatkan perlakuan yang sama dengan wajib pajak lain, sampai tidak adanya benturan kepentingan didalam hubungan tersebut. Pada saat wajib pajak sudah merasa adil, maka wajib pajak akan

cenderung patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini karena timbulnya rasa bersatu dan tidak ada batasan interaksi antara wajib pajak dan otoritas, sehingga merasa ingin membuat sebuah kemajuan untuk bersama.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori Lereng Licin, yang mana seberapa besar keadilan yang dirasakan maka akan menentukan patuh atau tidaknya wajib pajak (Kirchler, 2008).

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giswa (2015) dan Faisal (2014) bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap otoritas ditemukan sebagai syarat batas atas dampak dari keadilan prosedural yang dirasakan wajib pajak (Kohgler, 2008).

4. Pembahasan H2b : Pengaruh keadilan prosedural terhadap Tingkat Kepercayaan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan hasil H2b diterima. Artinya keadilan prosedural mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan yang akan diberikan wajib pajak terhadap otoritas.

Dalam Teori *Fairness Heuristik* dijelaskan bahwa masyarakat akan sangat mengamati setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak otoritas apakah prosedural sudah dilaksanakan secara adil atau belum (Giswa, 2015). Hal tersebut merupakan dasar masyarakat untuk menilai bagaimana tindakan prosedural yang sudah dilakukan. Dari situ masyarakat bisa menilai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas sehingga kepentingan sosial bersama justru dikesampingkan. Masyarakat

menggunakan *judgment* mereka sebagai sebuah panduan sederhana yakni dengan keadilan prosedural. Contohnya wajib pajak telah diberikan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi, perlakuan yang sama yang diterima antar sesama wajib pajak, dan kemudahan untuk serta memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan.

Pada saat wajib pajak telah merasakan suatu keadilan maka rasa kepercayaan akan timbul yang mana wajib pajak telah diyakinkan dengan perlakuan otoritas yang diterimanya (Murphy, 2004). Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak merasakan keadilan, maka mereka akan cenderung melakukan penilaian ulang dan evaluasi secara pribadi mengenai prosedur yang dirasa terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas menurun (van Dijke & Verboon, 2010).

5. Pembahasan H3 : Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak

Terpenuhinya kriteria penerimaan hipotesis menyimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan *Slippery Slope Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak bergantung pada kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajaknya.

Pada saat wajib pajak mempunyai persepsi yang tinggi bahwa pihak otoritas dapat dipercaya, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat. Oleh karena itu penting untuk dilakukan otoritas dalam

memelihara hubungan baiknya dengan wajib pajak dengan tindakan-tindakan yang positif sehingga juga akan menciptakan atmosfer hubungan yang positif pula. Wajib pajak yang mempunyai kepercayaan yang tinggi akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap otoritas (Cahyono, 2011). Dengan demikian kepercayaan wajib pajak mempengaruhi dorongan mereka untuk berkomitmen dan patuh dengan pajaknya.

Kepercayaan adalah salah satu hal yang sensitif dan harus sangat diperhatikan untuk mendapatkan timbal balik seperti yang diinginkan. Kepercayaan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan seperti apa kondisi perpajakan yang sedang terjadi. Banyak tidaknya kasus baik itu kecurangan, penggelapan, atau pelanggaran yang lain, akan sangat menentukan kepercayaan setiap wajib pajak. Yang mana hal itu juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil yang didapatkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014). Kepercayaan merupakan suatu prediktor yang signifikan untuk menciptakan kerjasama (Kircler, 2011).

6. Pembahasan H1c : Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas

Setelah melakukan pengujian hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa H1c diterima. Artinya variabel tingkat kepercayaan dapat diterima

sebagai variabel pemediasi sanksi terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014) yang juga menyatakan bahwa peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak dengan melalui tingkat kepercayaan terhadap otoritas sebagai pemediasi hubungan tersebut.

Sesuai teori *Slippery Slope Theory*, sanksi dipresepsikan sebagai ancaman/balasan bagi pihak pihak yang merugikan pihak otoritas dan wajib pajak itu sendiri. Sanksi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap otoritas (Larissa, 2012). Wajib pajak akan menilai sesuai dengan apa yang terjadi, bagaimana seorang pelanggar baik itu yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak otoritas, dijatuhkan sanksi. Apakah sanksi tersebut sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, atau justru masih banyak kecurangan yang bertujuan untuk meringankan atau menghapuskan sanksi bagi pelanggar pajak tertentu.

Pada saat wajib pajak percaya dengan pihak otoritas yang telah melaksanakan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu, maka akan timbul rasa takut apabila akan melakukan pelanggaran pajak. Sehingga wajib pajak cenderung lebih patuh karena tidak ingin diberikan sanksi. Begitupun sebaliknya, apabila sanksi dijatuhkan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menganggap sanksi bukan sebagai sesuatu yang harus ditakutkan kerana pelaksanaannya yang belum dilakukan secara benar oleh pihak otoritas. Wajib pajak akan mengabaikan surat dan semangat hukum

perpajakan (Kircler, 2007) Yang mana hal tersebut dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak.

7. Pembahasan H2c : Pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas

Dari pengujian hipotesis, didapatkan hasil bahwa H2c ditolak, yang artinya variabel tingkat kepercayaan tidak diterima sebagai variabel pemediasi hubungan antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Keadilan tentunya menjadi salah satu faktor yang menentukan wajib pajak akan berlaku patuh atau tidak.

Menurut *Slippery Slope* memang dijelaskan bahwa keadilan prosedural yang dilaksanakan wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan karena terdapat rasa percaya kepada otoritas bahwa otoritas telah memperlakukan semua wajib pajak secara adil. Hal ini mengakibatkan wajib pajak cenderung untuk lebih patuh. akan lebih efisien apabila keadilan prosedural secara langsung memengaruhi kepatuhan pajak dibandingkan harus melalui tingkat kepercayaan. Oleh karena itu kepercayaan justru akan melemahkan hubungan antara keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak (Permata dan Mangoting, 2014).

Hasil tersebut berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014). Terdapat beberapa alasan yang mendasari hasil tersebut. Salah satunya adanya pertimbangan keadilan dimana akan menyiratkan perbandingan dari kontribusi dan manfaat yang wajib pajak berikan, serta perbandingan bagaimana wajib pajak merasa

diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak lain. Keadilan yang dirasakan wajib pajak akan berpengaruh secara langsung secara psikologis untuk wajib pajak itu memutuskan untuk patuh atau tidak (Kohgler, 2014).

Pada saat tingkat kepercayaan digunakan sebagai pemediasi, maka wajib pajak akan cenderung untuk memilih percaya dengan pihak-pihak karena telah ditunjuk dan dipercaya oleh otoritas telah melakukan urusan perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sehingga akan memperlemah rasa keadilan melalui keadilan prosedural yang secara langsung dirasakan wajib pajak (Rahman, 2013). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Permata dan Mangoting (2014), yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dapat diterima sebagai pemediasi antara hubungan keadilan prosedural dan kepatuhan pajak.